

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Kas Negara merupakan wadah untuk menyimpan Uang Negara yang dalam hal ini menampung penerimaan negara dan membayar pengeluaran negara secara menyeluruh. Kas Negara ditentukan oleh Menteri Keuangan yang bertindak sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Dalam aktualisasinya, Kas Negara membutuhkan adanya suatu sistem yang digunakan dalam mengatur dan mengelola segala hal yang memiliki kaitan dengan Kas Negara, sistem tersebut bernama pengelolaan kas negara. Pengelolaan kas negara mencakup seluruh subjek yang memiliki atau menguasai Uang Negara, dengan objek yang terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Layanan Umum/Daerah.

Sesuai dengan pemaparan Buku Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia, pelaksanaan pengelolaan kas negara di Indonesia bertujuan untuk penggunaan dana negara yang dikelola secara efektif dan efisien (DJPB, 2017). Pengelolaan kas negara yang efektif dan efisien tersebut dapat terwujud dengan:

- a. Menentukan jumlah dana optimal yang dalam hal ini diperlukan sebagai jaminan kemampuan Pemerintah untuk mendanai seluruh kegiatannya.
- b. Menentukan pembiayaan yang bersifat ekonomis juga efisien, dengan bersumber dari dalam dan luar negeri sebagai instrumen pembiayaan kegiatan Pemerintah.
- c. Meminimalisir jumlah *idle cash* atau kas yang menganggur dengan mengelola *float*, melakukan perencanaan kas yang baik, dan investasi berjangka pendek terhadap kas yang menganggur sebagai upaya menambah penerimaan negara.
- d. Melakukan percepatan penyetoran penerimaan negara, dengan demikian dana tersebut tersedia dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah dan melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

Pengelolaan kas negara yang efektif dan efisien memiliki keterkaitan yang erat dengan kehadiran sistem manajemen kas. Sebuah sistem yang melakukan pengelolaan terhadap sumber daya kas atas suatu badan atau organisasi, guna berlangsungnya fungsi suatu badan atau organisasi dengan menggunakan kas yang dimiliki dengan cara tepat guna, yang dikenal dengan manajemen kas. (Murwanto et al., 2006). Senada dengan hal tersebut, Mike Williams (2004, dikutip dalam Murwanto, Infsyafiah & Subkhan, 2006) menyatakan bahwa manajemen kas pemerintahan wujud dari strategi serta berbagai proses yang ada di dalamnya untuk mengelola arus kas berjangka pendek dan berbagai saldo kas pemerintahan maupun antar pemerintah dengan berbagai sektor lainnya secara efektif dan efisien.

Dalam implementasinya, tentunya tidak jarang dijumpai berbagai macam kendala atau problematika yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah dalam mengelola kas negara maupun daerah. Kendala yang dijumpai tersebut dapat berupa kendala internal maupun eksternal. Salah satu kendala yang saat ini dijumpai dalam pengelolaan kas negara dan daerah ialah adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Kehadiran pandemi COVID-19 di penghujung tahun 2019 membawa serentetan dampak negatif di berbagai sektor, salah satunya guncangan berupa ketidakstabilan pada sektor perekonomian secara nasional.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Keuangan (2020), pemerintah mewaspadaai adanya dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan perekonomian nasional yang mengalami perlambatan, penerimaan negara mengalami penurunan disertai peningkatan dalam belanja negara dan pembiayaan, menjadi bukti timbulnya *domino effect* dari kehadiran pandemi ini (Puspasari, 2020). Hal-hal lain yang menjadi bukti adalah dengan terpengaruhnya kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun berjalan dan tahun anggaran berikutnya, khususnya pengelolaan anggaran negara yang turut mengalami penyesuaian sebagai bentuk mitigasi Pemerintah dalam rangka melakukan penyelamatan terhadap perekonomian nasional dalam mengelola APBN secara hati-hati, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang membahas mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam upaya penanganan pandemi COVID-19.

Faktor-faktor yang patut diperhatikan dalam menjaga kestabilan sistem keuangan berupa pengelolaan anggaran negara yang ada pada APBN adalah menjaga sistem ketersediaan kas negara/daerah dalam pengelolaan kas dan optimalisasi kas negara/daerah tersebut. Pengelolaan kas negara dalam kondisi yang tergolong *force majeure* seperti saat ini tergolong vital, termasuk peran ketersediaan kas yang ada di dalamnya.

Faktor berikutnya adalah memastikan bahwa ketersediaan kas berupa uang atau dana untuk membiayai belanja program-program yang ada dengan tepat waktu dalam APBN/D sampai akhir tahun anggaran, sehingga dibutuhkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan kas. Tidak hanya pada tingkatan pemerintahan pusat, hal yang serupa juga terjadi pada tingkat pemerintahan daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam ruang lingkup Pengelolaan Kas Negara, Pemerintah Daerah sebagai salah satu objek pengelolaan kas berwenang dalam mengelola Kas Daerah. Kas Daerah merupakan wadah untuk menyimpan Uang Daerah dalam hal ini menampung penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan yang melatar belakangi penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penelitian ini tertarik untuk mengambil fokus atas pengelolaan kas berupa pengelolaan ketersediaan kas, optimalisasi kas, dan pengendalian kas untuk selanjutnya melakukan tinjauan atas pengelolaan kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam periode sebelum pandemi dan saat pandemi, yakni tahun 2018 hingga 2020. Dalam hal ini, penelitian ini ingin meninjau upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

selama masa pandemi COVID-19, bagaimana bentuk kas daerah yang ada. Selain itu, di dalam penelitian ini juga ingin meninjau permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kas selama masa pandemi COVID-19, dan penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di masa sebelum pandemi dan di saat pandemi berlangsung.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan optimalisasi kas selama masa pandemic?
2. Bagaimana bentuk pengelolaan rekening kas daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengelola ketersediaan kas yang ada selama masa pandemi?
3. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kas selama masa pandemi dan apa saja bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Atas dasar latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan akhir dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meninjau dan mendeskripsikan bagaimana optimalisasi kas selama masa pandemi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui BPKAD;

2. Untuk menganalisis pengelolaan rekening kas daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengelola ketersediaan kas yang ada selama masa pandemi;
3. Untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kas selama masa pandemi dan bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan tinjauan dan pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini memiliki titik fokus pada studi kasus pengelolaan kas daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dibatasi dalam periode sebelum pandemi dan saat pandemi, dengan acuan peraturan perundang-undangan, dasar hukum lainnya, dan literasi yang menunjang penelitian. Ruang lingkup pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini meliputi optimalisasi kas dan pengelolaan ketersediaan kas. Di dalam penelitian ini juga akan membahas permasalahan dan bentuk penyesuaian pengelolaan kas yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan juga pengetahuan kepada akademisi berupa implementasi mata kuliah yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Selain itu

diharapkan mampu sebagai penunjang dalam kemampuan menyusun karya tulis, dan penelitian-penelitian lainnya. Karya tulis ini juga dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian-penelitian di masa yang akan datang mengenai Pengelolaan Kas Negara/Daerah;

2. Karya Tulis Tugas Akhir ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam segi informasi, wawasan juga pengetahuan baru kepada para pembaca berdasarkan implementasi dari mata kuliah yang diangkat;
3. Karya Tulis Tugas Akhir ini juga sebagai sarana referensi, evaluasi dan pertimbangan bagi pihak berwenang dalam hal ini pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kas Negara/Daerah.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini terdiri atas 4 (empat) bab dengan urutan dan rincian pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, berisi gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang memuat subbab-subbab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini, berisi berbagai teori atau tinjauan pustaka mengenai pokok bahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Dalam landasan teori ini akan

menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yakni Pengelolaan Kas Negara/Daerah.

### BAB III METODOLOGI DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri atas metodologi penelitian dalam mengumpulkan dan meraih data-data serta informasi-informasi yang menunjang penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil.

#### a. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini menjelaskan mengenai Metode Pengumpulan Data yang terdiri atas beberapa metode antara lain Metode Penelitian Kepustakaan berupa analisis dokumen, literatur, buku, dan laporan terkait, dan Metode Penelitian Lapangan yang berasal dari studi lapangan berupa wawancara dan observasi melalui pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengajukan pertanyaan terkait studi kasus pengelolaan kas di masa sebelum pandemi dan di saat pandemi.

#### b. Gambaran Umum Objek Penulisan

Pada bagian ini menguraikan informasi dan gambaran umum mengenai objek penulisan yang berkaitan erat dengan topik Karya Tulis Tugas Akhir berupa studi kasus pengelolaan kas di masa sebelum pandemi dan di saat pandemi.

#### c. Pembahasan Hasil

Pada bagian ini membahas hasil pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan secara deskriptif, dengan membahas analisis dokumen terkait dan hasil penelitian berupa membandingkan antara praktik/fenomena yang terkait

mengenai studi kasus pengelolaan kas di masa sebelum pandemi dan di saat pandemi.

#### BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, akan memberikan kesimpulan atas dasar hasil penelitian dan pembahasan tentang berbagai rumusan masalah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Penelitian ini juga akan memberikan saran-saran yang didasarkan pada analisis data dan informasi-informasi aktual yang didapatkan selama penelitian sebagai upaya masukan dalam Pengelolaan Kas Negara/Daerah.